

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keunggulan pada Sumber Daya Alam nya. Sumber Daya Alam yang melimpah disebabkan letak geografis negara Indonesia yang berada di garis katulistiwa dan di antara 2 samudera 2 benua sehingga kaya akan flora fauna yang melimpah, juga menjadi ciri khas karena tidak dimiliki oleh negara-negara lain di bumi ini. Setiap daerah di Indonesia, yang terbagi menjadi 34 Provinsi memiliki keunggulan dan kekayaan alam masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Hal tersebut dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas yaitu sebesar 1.905 juta kilometer persegi yang tentunya berdampak pada keanekaragaman sumber daya alam serta menyebabkan perbedaan pada struktur alam geografisnya.

Letak geografis daerah yang berada di pesisir menyimpan keunggulan sumber daya alam pada hasil kekayaan laut dan pariwisatanya, kemudian daerah yang berada di dataran rendah dapat memanfaatkan lahannya untuk pertanian, lalu daerah yang letak geografisnya berada di pegunungan maka dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk dijadikan pariwisata dan perkebunan yang cocok ditanam pada tanah daerah tersebut.

Kabupaten Semarang, menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki letak geografis yang sebagian besar berada di ketinggian yaitu terletak pada posisi 110°

14°54,7” - 110° 39’33,3” Bujur Timur dan 7°3’57” - 7° 30’00” Lintang Selatan (RPJM Bidang Cipta Kerja Kabupaten Semarang). Keempat koordinat bujur dan juga lintang tersebut menyebabkan adanya batasan wilayah yaitu seluas 950,21 kilometer persegi. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Semarang adalah daratan tinggi yang apabila dihitung rata-ratanya adalah seluas 544,21 meter diatas permukaan air laut.

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Semarang Jawa Tengah



Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2017

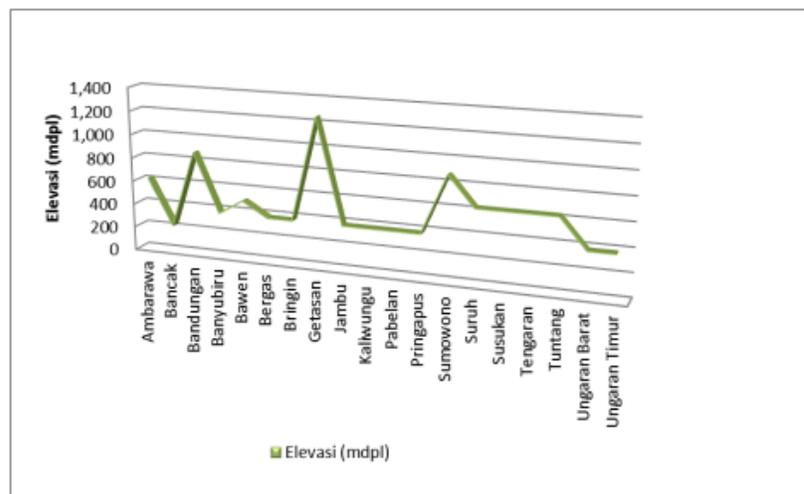
Kabupaten Semarang merupakan wilayah yang termasuk di bagian utara Provinsi Jawa Tengah dan berada di bagian selatan dari Ibukota Provinsinya yaitu Kota

Semarang. Fakta menarik dari letak geografisnya, yaitu Kabupaten Semarang memiliki wilayah yang mengelilingi Kota Salatiga. Sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Semarang naik dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 1.053.094 jiwa (BPS Kabupaten Semarang).

Letak geografis yang tidak sama menyebabkan masyarakat yang berada di dataran rendah menggantungkan hidupnya di bidang industri, usaha, dan lain-lain. Perbedaan letak geografis dibuktikan dengan pabrik yang berjalan di bidang industri di daerah Ungaran sampai dengan Bawen. Masyarakat yang berada di wilayah pegunungan seperti di daerah Bandungan, Sumowono, Kopeng, Jambu memenuhi kebutuhannya dengan cara bercocok tanam karena jenis tanah dan potensi alam yang mendukung untuk dijadikan sumber penghidupan.

Gambar 1.2

Grafik Morfologi Lahan Kabupaten Semarang



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang

Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki masyarakat yang berada di daerah beriklim dingin di Kabupaten Semarang menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas. Pada daerah yang berada di dataran tinggi tentu banyak faktor yang dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pembangunan di masyarakatnya terlebih lagi dikarenakan daerah tersebut memiliki banyak potensi sumber daya alam yang menjadi sarana dan fasilitas alami untuk kemajuan daerah tersebut dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada.

Potensi merupakan keunggulan yang dimiliki oleh suatu daerah dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut serta pengelolaannya dapat dirasakan manfaatnya. Pengertian diatas dapat dipahami bahwasannya potensi sumber daya alam bagi suatu daerah merupakan suatu keunggulan dan keutamaan yang dimiliki oleh daerah berbasis pada kekayaan alam yang dimiliki sedari dulu atau budaya setempat, pengelolaan potensi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai modal sumber pembangunan dan kemajuan masyarakatnya.

Potensi sumber daya alam akan dapat dirasakan manfaatnya apabila dapat diolah dengan baik. Pemanfaatan sumber daya alam yang salah juga dapat merusak kondisi alam yang dimiliki karena eksploitasi berlebihan dan pemanfaatan dengan cara-cara yang salah dengan tidak memperhatikan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan atau tidak menerapkan sistem berkelanjutan. Pembangunan masyarakat menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, tujuan dari pembangunan masyarakat akan tercapai apabila terjadi keselarasan dari faktor-faktor

terkait baik dari peran internal maupun eksternal. Potensi Sumber Daya Alam akan dapat dirasakan manfaatnya apabila pembangunan masyarakat terlaksana dengan metode yang baik dan benar oleh *stakeholders*. Pembangunan masyarakat akan berpengaruh pada bidang ekonomi karena pencapaian kegiatan pembangunan dengan memberdayakan masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah yang sedang melakukan upaya pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dapat dipahami bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, yaitu tujuan diselenggarakan kesejahteraan sosial adalah “Sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan juga perlindungan sosial”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan sosial adalah dengan melakukan pemberdayaan sosial. Partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan daerah hakekatnya menjadi suatu program yang dinamakan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan pada suatu daerah mendorong potensi yang besar untuk kesejahteraan masyarakatnya, tentunya dengan perencanaan dan pengelolaan yang matang serta terintegrasi dalam wadah organisasi yang baik dari pihak-pihak terkait. Masyarakat memegang andil yang besar dalam proses pembangunan karena menjadi subjek utama dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan serta menjadi pemeran utama dalam untuk menaikkan taraf hidupnya agar lebih baik.

Abdul Najib (dalam Alin, 2017 : 89) menjelaskan definisi dari pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan ; sebagai proses, adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberadaan kelompok lemah di dalam masyarakat, mencakup individu-individu yang terperangkap dalam lubang kemiskinan. Pemberdayaan yang dipandang sebagai suatu tujuan, adalah kegiatan yang dilakukan karena merujuk kepada hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan perubahan sosial seperti contohnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, mempunyai kekuasaan atau power, dan juga perubahan nasib bagi masyarakat miskin. Pembangunan memerlukan manusia dan sumber daya alam seperti lahan yang digunakan sebagai salah satu dasar utama pendorong kegiatan pembangunan. Penggunaan lahan yang tidak dikelola dengan bijak akan mendatangkan permasalahan baru karena hampir seluruh kegiatan manusia memanfaatkan penggunaan lahan sebagai pijakan aktivitas yang akan berdampak terhadap lingkungan sekitar.

Menurut Malik dan Sungkowo (dalam Purwowibowo, 2021 : 59) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan dengan melalui pemilihan *alternative* untuk membuat produksi pertanian lokal lebih memberikan *profit* dan

keuntungan, yakni dengan cara pendekatan kooperatif, inovasi, dan juga menggabungkan hasil panen sehingga akan mempunyai nilai tambah yang tinggi apabila dijalankan dengan cara pemrosesan dari hilir sampai dengan hulu.

Kabupaten Semarang yang memiliki suhu rendah dan sebagian besar beriklim sejuk berdampak kepada potensi sumber daya alam yang dimiliki cocok untuk segala jenis tanaman-tanaman perkebunan yaitu contohnya teh, karet, kopi, cengkeh, dan masih banyak tanaman perkebunan lainnya.

Gambar 1.3

Statistik Lingkungan Kabupaten Semarang



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

Tanaman yang berada di perkebunan masyarakat Kabupaten Semarang mayoritas adalah berjenis perkebunan kelapa dalam, kelapa deres, dan juga perkebunan kopi berjenis robusta yang dimana luas lahan yang dimiliki meningkat mencapai 60% berdasarkan Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2009 (dalam

Sindy, et al. 2016 : 117). Salah satu studi kasus yang dapat diambil contoh pada penelitian ini berdasar penjelasan diatas adalah komoditas perkebunan kopi yang menjadi salah satu unggulan tanaman perkebunan di Kabupaten Semarang.

Industri kopi menjadi salah satu produk perkebunan yang paling dilirik oleh masyarakat luas dalam beberapa tahun belakangan ini. Fenomena itu ditandai dengan menjamurnya kedai-kedai *coffeshop* yang ada di Indonesia. Masyarakat (terutama kalangan muda) sering menghabiskan waktunya di *coffeshop*, baik berkumpul dengan teman-teman mendiskusikan suatu hal, atau hanya sekedar nongkrong, dan juga menghabiskan waktu sendiri mengerjakan pekerjaannya di depan laptop ditemani dengan secangkir kopi di sebelahnya. *Trend* berkumpul di kedai kopi menjadi salah satu fenomena baru di masyarakat dan juga karena potensi yang terlihat menjanjikan tersebutlah menyebabkan banyak pengusaha yang tertarik membuka kedai kopi dengan berbagai tema di penjuru dunia tidak terkecuali negara Indonesia.

Masyarakat sudah bisa menikmati secangkir kopi dan menghabiskan waktu seharian di kedai kopi dengan harga kisaran belasan ribu rupiah saja. Populernya usaha *coffeshop* dikalangan masyarakat tersebut otomatis berdampak kepada peningkatan kebutuhan kopi. Kebutuhan akan kopi yang meningkat menimbulkan dampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya petani kopi dengan melalui pemberdayaan yang terpadu.

Di Kabupaten Semarang, tepatnya Doesoen Kopi Sirap yang berlokasi di Dusun Sirap, Desa Kelurahan, Kecamatan Jambu muncul geliat pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya berbasis perkebunan kopi. Doesoen tersebut berada di

kawasan Pegunungan Kelir yang berada di jalan utama antara Kota Semarang dan Kota Magelang. Lokasi desa wisata ini termasuk mudah untuk ditemukan karena terletak di tengah-tengah antara jalan utama Semarang-Jogja dan berada sekitar 7 Kilometer dari Ambarawa menuju arah Yogyakarta

Dusun Sirap yang berada di dataran tinggi berdampak kepada iklim yang dimiliki, yaitu beriklim sejuk dan dingin. Kondisi iklim tersebut mendorong terciptanya potensi sumber daya alam sebagai modal kemajuan desa melalui sektor perkebunan dan wisata. Iklim yang sejuk dan tanah yang subur menyebabkan banyak jenis tumbuhan akan tumbuh dengan subur pada iklim ini. Kelebihan utama yang dimiliki oleh Dusun Sirap adalah pada komoditas perkebunan kopinya. Wisata edukasi berbasis kopi menjadi salah satu ide segar bagi perkembangan wisata yang ada di Kabupaten Semarang.

Dusun Sirap menghadapi beberapa permasalahan yang menghambat pembangunan desa meskipun memiliki potensi yang besar pada awal perkembangannya, informasi tersebut didapatkan dari beberapa narasumber terkait, jurnal, serta artikel terdahulu.

Tanaman kopi akan dapat bernilai tinggi apabila diproses dengan cara yang baik sehingga menghasilkan produk yang memiliki kualitas tinggi sesuai standar di pasaran dan letak geografis yang cocok untuk dijadikan tempat wisata akan dapat menghasilkan hasil yang dapat menambah pendapatan masyarakat apabila diolah dengan pelatihan serta bantuan modal, inovasi, dan pembinaan bagi masyarakat Dusun Sirap dalam

mengelola kawasan desanya agar potensi besar tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Program pemberdayaan desa sudah mulai terlihat sejak tahun 2004. Pembangunan desa dimulai dengan terjalinnya kerjasama desa dengan dinas-dinas terkait seperti contohnya Dinas Pertanian, Dinas UMKM, dll . Program kerjasama dijalin untuk melatih ketrampilan masyarakat setempat dalam mengelola perkebunan kopi dengan sistem tanam, perawatan, serta cara panen dengan baik dan benar. Program pelatihan juga dilakukan untuk mengembangkan pariwisata.

Pemerintah berperan untuk menyumbangkan saran bahwa hasil dari tanaman palawija kurang maksimal untuk meningkatkan ekonomi desa, warga mulai beralih ke tanaman lain yang lebih cocok dengan letak geografis sehingga dikembangkan tanaman kopi di daerah tersebut. Dua jenis kopi yang ditanam pada lahan desa ini, yaitu kopi jenis Robusta dan Arabica. Di dalam beberapa periode waktu masyarakat melakukan riset dan analisis terhadap dua jenis tanaman kopi tersebut.

Hasil dari analisis yang dilakukan, yaitu jenis kopi Arabica ternyata kurang cocok untuk ditanam di daerah tersebut hal itu ditandai dengan banyaknya hama dan hasil panen biji kopinya yang kurang maksimal yang dikarenakan letak desa sirap yang kurang tinggi untuk tanaman kopi jenis Arabica, sebaliknya jenis kopi Robusta menghasilkan panen yang memuaskan dikarenakan ketinggian yang dimiliki oleh Dusun Sirap yaitu 800 mdpl memang sangat cocok untuk jenis tanaman tersebut sehingga terkenal lah dusun ini akan *Java Mocca* nya yang menggebrak dunia perkopian nasional.

Pada tahun 2013, setelah memenangkan penghargaan Juara 1 Nasional dalam Ketahanan Pangan Dusun Sirap di Kecamatan Jambu mulai dikenal oleh khalayak luas baik dalam kancah nasional maupun internasional dalam keunggulan pada produk kopinya. Warga Doesoen Sirap akhirnya memanfaatkan Gedung Sekretariat Kelompok Tani Rahayu IV sebagai tempat untuk membukai kedai kopi yang dinamakan “Wande” atau kepanjangan dari Warung Ndeso pada tahun 2017. Kedai tersebutlah yang menjadi wadah berkumpulnya para wisatawan yang berkunjung ke Doesoen Wisata Desa Sirap.

Di kedai Wande tersebut sering diadakan studi banding, edukasi proses pembuatan kopi, wisata alam, dan juga tempat untuk jual beli kopi dari Dusun Sirap. Produksi tanaman kopi sudah menembus pasar internasional dengan penjualan kopi sudah sampai ke pasar ekspor yaitu negara-negara Korea, Jepang, Cina, dan Arab yang disalurkan melalui eksportir PT. Taman Delta dan sisanya dipasarkan di kawasan ritel.

Kelompok Tani Rahayu IV merupakan organisasi khusus dari Dusun Sirap yang berperan sebagai lembaga untuk mengembangkan kopi agar penjualannya lebih tinggi dari para tengkulak, organisasi tersebut termasuk ke dalam anggota Gapoktan (terdiri dari 18 kelompok tani) yang tersebar di kawasan daerah Pegunungan Kelir. Kelompok Tani Rahayu IV dipimpin oleh Bapak Ngadiyanto yang merangkap juga sebagai pemimpin Gapoktan. Di dalam organisasi tersebut terjadi kegiatan jual beli *green beans* untuk dipasarkan ke konsumen.

Pemberdayaan masyarakat juga didukung dari pihak luar yang terlihat dari terjalinnya kerjasama dengan pihak-pihak swasta yaitu seperti Bank Bri, Telkomsel,

Bank BCA, dan lainnya. Pihak swasta yang masih tetap melakukan kerjasama sampai sekarang adalah berasal dari pihak BCA.

Program pemberdayaan masyarakat akan membawa dampak pada pertumbuhan kesejahteraan dari masyarakat yang ada di Dusun Sirap sehingga akan meningkatkan potensi kemajuan pada bidang ekonomi, sosial serta budaya yang ada di daerah tersebut. Peningkatan pada bidang-bidang tersebut tentu berkorelasi pada kesejahteraan keluarga yang ada di Dusun Sirap, Kecamatan Jambu yang memang sebagian besar warganya menggantungkan hidup dengan bertani kopi.

Tabel 1.1
Data Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan di Kecamatan Jambu
Kabupaten Semarang Tahun 2020

Jenis Tanaman	Jumlah (Ton)
Kelapa Dalam	301
Cengkeh	10
Kopi Robusta	533
Vanili	0
Kopi Arabica	1
Cassiavera	0
Aren	307
Kelapa Hibrida	3

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pangan Kabupaten Semarang

Pada tabel 1.1 tersebut menunjukkan data bahwa jenis tanaman yang menduduki peringkat pertama yang paling banyak dihasilkan di daerah Kecamatan Jambu adalah pada jenis perkebunan kopi robusta dengan jumlah 529.66/ton terdapat selisih 223.13 dengan peringkat keduanya, yaitu jenis tanaman aren dengan jumlah 306.53. sedangkan vanili menempati posisi terakhir dengan jumlah 0.21.

Kesimpulan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis tanaman kopi robusta menjadi komoditas terbesar yang dihasilkan oleh masyarakat Kecamatan Jambu terutama di Dusun Sirap sehingga diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai modal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kemajuan dusun belum dapat tercapai secara optimal karena proses pemberdayaan masih terhambat beberapa kendala.

Gambar 1.4
Proses Pengolahan Biji Kopi Secara Manual



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022.

Dusun Sirap sudah memperlihatkan geliat kemajuannya berbasis perkebunan kopi dan pariwisatanya karena potensi sumber daya yang melimpah juga karena menjamurnya tren *coffeshop* di kalangan masyarakat namun, masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam mencapai tujuan untuk menjadi dusun yang optimal dalam menyejahterakan warganya.

Solusi dari permasalahan tersebut dapat dilakukan beberapa kegiatan, pengelolaan, serta peran aktif dari aktor-aktor terkait dalam upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Dusun Sirap dengan menyerap dan menggunakan faktor-faktor pendukung dengan maksimal.

Dusun Sirap yang memiliki sumber daya melimpah namun terkendala dengan berbagai permasalahan menjadi dasar untuk dilaksanakan kegiatan penelitian ini, sehingga diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap keberlanjutan pengembangan pemberdayaan masyarakat di Dusun Sirap dengan aktivitas pemasaran dan peningkatan produk kopi yang dapat divarisasikan juga pengelolaan kopi dengan berpedoman pada cara pengolahan kopi yang disarankan oleh ahlinya, serta peningkatan program wisata dengan akses jalan yang mudah bagi para wisatawan melalui penelitian yang berjudul "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Sentra Kopi di Desa Wisata Doesoen Sirap Kabupaten Semarang".

Di dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk memberikan skema gambaran dalam mencapai tujuan menjadi desa maju dengan menggunakan pendekatan teori tahapan pengelolaan pemberdayaan masyarakat. Ilmu Administrasi Publik dengan

pemberdayaan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pelayanan pada publik atau masyarakat, karena dalam proses pemberdayaan salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan perekonomian sehingga dapat menciptakan negara sejahtera yang berdampak pada kualitas pelayanan publik.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Peneliti merumuskan masalah yang tepat untuk mendasari kegiatan penelitian yang dilakukan, yaitu :

- a. Bagaimana proses manajemen pemberdayaan masyarakat melalui sentra kopi di Dusun Sirap ?.
- b. Apakah faktor-faktor pendorong dalam manajemen pemberdayaan masyarakat di Dusun Sirap ?.
- c. Apakah faktor-faktor penghambat dalam manajemen pemberdayaan masyarakat di Dusun Sirap ?.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian yang dilakukakan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses manajemen yang tepat untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui sentra kopi di Dusun Sirap Kabupaten Semarang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendorong manajemen pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Dusun Sirap.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat manajemen pemberdayaan masyarakat melalui sentra kopi di Dusun Sirap Kabupaten Semarang.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan berupa ide dan inovasi sebagai upaya untuk pengoptimalan pemberdayaan masyarakat melalui sentra kopi dan wisata di Dusun Sirap Kabupaten Semarang.
2. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai strategi yang tepat untuk mengembangkan faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat dalam pengoptimalan pemberdayaan masyarakat melalui sentra kopi dan wisata di Dusun Sirap Kabupaten Semarang.
3. Memberikan sumbangan referensi karya ilmiah pada penelitian-penelitian yang akan mendatang dengan tema pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dan kopi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti
 - 1) Memberikan pengalaman dan pengetahuan baru mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis kopi dan wisata khususnya yang ada di Dusun Sirap Kabupaten Semarang.

2) Memberikan pengalaman dan pengetahuan baru mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam usaha pengoptimalan pemberdayaan masyarakat berbasis kopi dan wisata khususnya yang ada di Dusun Sirap Kabupaten Semarang.

2. Bagi Masyarakat

1) Memberikan pemahaman dan ide bagi pengembangan dusun.

2) Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pengembangan dusun..

3. Bagi Pemerintah

1) Memberikan analisis dan evaluasi mengenai program yang sesuai dalam rangka usaha pengoptimalan pemberdayaan masyarakat berbasis kopi dan wisata khususnya yang ada di Dusun Sirap Kabupaten Semarang.

2) Memberikan ide perumusan kebijakan yang sesuai terkait faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pengembangan dusun.

4. Bagi Swasta / Lembaga

1) Memberikan informasi dan pengetahuan baru terkait potensi sumber daya alam berbasis kopi dan wisata khususnya yang ada di Dusun Sirap Kabupaten Semarang.

2) Memberikan pandangan kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya pengembangan desa sebagai usaha untuk pengoptimalan pemberdayaan masyarakat berbasis kopi dan wisata khususnya yang ada di Dusun Sirap Kabupaten Semarang.

1.5. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abou-Shouk, M. A., Manna, M. T., & Elbaz, A. M. 2021. <i>Women's empowerment and tourism development: A cross-country study.</i> 1-4.	Menambah pengetahuan dan pandangan baru akan pengaruh dari pemberdayaan perempuan dalam melakukan pengembangan pariwisata di tiga negara Arab yang berbeda : Mesir, Uni Emirate Arab, dan Oman. Metode penelitian kuantitatif.	Hasil dari penelitian adalah terdapat pengaruh berbeda pada pemberdayaan perempuan terhadap pembangunan di tiga negara Arab tersebut. Dampak pemberdayaan perempuan pada pengembangan pariwisatanya yaitu Uni Emirat Arab, yang kedua diikuti oleh negara Mesir dan diposisi terakhir yaitu negara Oman.
2.	Apsari, N, et al. 2017. <i>Pemberdayaan Petani Kopi Melalui Penguatan Kapasitas Dalam Pengolahan Hasil Kopi di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kab.</i>	Mengoptimalkan kemampuan para petani kopi (masyarakat) untuk dapat mengolah hasil kebun kopinya secara maksimal dengan penguatan kapasitas. Metode yang digunakan adalah kualitatif.	Menghasilkan perbandingan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan penelitian maka terdapat hasil perubahan yang mengarah ke sisi positif yang dapat diambil contoh terjadinya peningkatan pengetahuan masyarakat akan pengolahan kopi dari pasca panen untuk menghasilkan nilai ekonomis dari proses pengelolaannya.

	Sumedang. 4(2), 290-295.		
No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Amri, K., & Ferizko, A. (2020). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bengkalis. <i>Jurnal Niara</i> , 13(1), 227-236.	Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan manajemen pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan analisis kualitatif.	Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan masih belum maksimal, dapat dilihat dari rendahnya upaya pemerintah untuk membuat kebijakan atau peraturan yang dapat membantu kemajuan desa-desa di Kabupaten Bengkalis terutama desa tradisional yang masih tertinggal.
4.	Izzah, L, et al. 2020. Model Pengembangan Desa Ekowisata Kawasan Perkebunan Kopi Desa Sukorejo Kabupaten Bondowoso. 1(1). 390-399.	Menjelaskan suatu model dari pengembangan Desa Ekowisata di Kawasan lingkungan perkebunan kopi tanpa merusak lingkungan aslinya.. Menggunakan metode kualitatif.	Desa wisata ini cocok untuk memenuhi kriteria menjadi desa Ekonomi wisata dengan melihat pemenuhan kriteria dari sumber data alam dan masyarakat sekitarnya sehingga dapat membawa dampak <i>revenue generating</i> bagi pihak-pihak terkait (masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah).
	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Harahap, M. E. U. (2020). Manajemen	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan dan	Hasil penelitian yaitu kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan harus

	<p>Pemberdayaan Masyarakat. <i>Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan</i>, 2(1), 189-204.</p>	<p>model kegiatan pemberdayaan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kajian Pustaka dengan mengkaji teori-teori manajemen yang selaras dengan konteks pemberdayaan.</p>	<p>sesuai dengan proses manajemen yang sesuai dan baik, dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pengawasan agar kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan dapat menciptakan sekumpulan masyarakat yang berdaya.</p>
	<p>Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian</p>	<p>Tujuan dan Metode Penelitian</p>	<p>Hasil Penelitian</p>
<p>6.</p>	<p>Heyi, Bahiru D. 2020. <i>The Role of Participation in Development in Enhancing Local People Empowerment: The case of Bishoftu City Administration</i></p>	<p>Mendefinisikan pengaruh dari partisipasi dalam pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat lokal di Oromia. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran (kualitatif dan kuantitatif).</p>	<p>Dari penelitian ditemukan bahwa bahwa terjadi kekurangan akses informasi pemerintah yang menghambat transparansi sehingga akhirnya memperlambat potensi dalam pemberdayaan masyarakat. Rendahnya tingkat partisipasi disebabkan karena terhambatnya pemberdayaan politik yang diperoleh berdasarkan evaluasi</p>

	(BCA), <i>Oromia</i> . 172-178.		system, menafsirkan hasil evaluasi, dan perbaikan manajemen.
No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Ibrahim, M.S.N., Halim, S.A., Ishak. M.Y., Hassan. S. 2020. <i>The local community awareness on Langkawi UNESCO Global Geopark Status: Case of Kampung Padang Puteh, Langkawi, Malaysia</i> . 2-7.	Tujuan penelitian adalah menyelidiki pengetahuan masyarakat local tentang adanya <i>geopark</i> dan mencari informasi persepsi dari masyarakat tentang berbagai peran dari pemangku kepentingan dalam membantu mendorong kesejahteraan melalui pengembangan pariwisata.. Metode kualitatif dan kuantitatif (campuran).	Hasil penelitian adalah setengah dari responden bisa menggambarkan karakteristik <i>geopark</i> namun hanya 18,4% yang dapat mendiskripsikan konsep <i>geopark</i> dengan baik dan benar juga mereka tidak terlalu mengetahui tentang manfaat dari <i>geopark</i> untuk sumber mata pencaharian mereka. Kesimpulannya adalah masyarakat di kampung <i>padang puteh</i> mempunyai tingkat pengetahuan akan <i>geopark</i> yang berada di level tengah,

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Susiyanti, Ambar. 2018. Analisis Daya Saing Kompetitif Agrowisata Kopi Dusun Sirap, Desa Kelurahan, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang Menggunakan Pendekatan <i>Diamond Mode</i> . 22-32.	Mengetahui daya saing wisata kopi Dusun Sirap yang dilihat dari aspek kondisi faktor- faktor pendukung serta mengetahui strategi kebijakan pengolahan agrowisata untuk peningkatan daya saing melalui konsep pembaruan pemasarannya.. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa setelah melihat kondisi yang ada maka memang diperlukan perubahan yaitu dalam penambahan objek wisata, serta harus ada upaya untuk peningkatan sasaran wisatawan mancanegara yang datang ke Dusun Sirap.
	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian

9.	Silmi, Alin. F. 2017. <i>Participatory Learning And Action (PLA) di Desa</i> Terpencil : Peran LSM Provinsi Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo Sumatra Selatan. 1(1). 86-100.	Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Yogyakarta dengan pendekatan PLA untuk memberdayakan desa terpencil di Sumatera Selatan.. Metode yang digunakan adalah kualitatif.	Hasil dari penelitian adalah metode yang digunakan dalam upaya pemberdayaan adalah dengan cara langsung dengan memberikan pengarahan tetapi sekaligus praktik kepada masyarakat yang focus pemberdayaannya adalah pada bidang perkebunan dan pertanian.
----	---	--	---

Dari tabel di atas, maka penulis dapat menjabarkan karya terdahulu yang menjadi landasan penulisan karya ilmiah ini, uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Abou-Shouk, M. A., Manna, M. T., & Elbaz, A. M. 2021. *Women's empowerment and tourism development: A cross-country study*. 1-4. Pada penelitian ini terdapat persamaan pada peran masyarakat terutama perempuannya dalam memberdayakan daerahnya melalui pembangunan sector pariwisata. Masalah yang diangkat adalah mengkaji pemberdayaan yang dilakukan oleh perempuan untuk mengembangkan pariwisata di tiga negara Arab (Mesir-Uni Emirat Arab-Oman). Perbedaannya adalah pada metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan Teknik pengumpulan datanya adalah survei dan kuesioner kepada mahasiswa yang berada di tiga negara Arab tersebut.
2. Apsari, N, et al. 2017. Pemberdayaan Petani Kopi Melalui Penguatan Kapasitas Dalam Pengolahan Hasil Kopi di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kab. Sumedang. 4(2), 290-295. Penelitian ini memberdayakan masyarakat melalui potensi sumber daya alam yang

berasal dari Kopi. Permasalahan utama nya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pelestarian pada lingkungan hidup yang menyebabkan rendahnya dampak yang dirasakan pada sektor perekonomian masyarakat setempatnya. Perbedaan dari penelitian ini adalah hanya berfokus pada produk kopi tidak merambah ke pariwisata. Pada penelitian ini menggunakan strategi penguatan kapasitas. Lokus penelitian ini berada di Kabupaten Sumedang, sedangkan peneliti melaksanakan proses penelitiannya di Kabupaten Semarang.

3. Amri, K., & Ferizko, A. (2020). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Niara*, 13(1), 227-236. Di dalam penelitian ini terdapat persamaan pada teori yang digunakan yaitu manajemen pemberdayaan masyarakat dan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil pembahasannya yaitu di daerah tersebut pelaksanaan pengolahan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan masih belum maksimal. Pemberdayaan masyarakat yang masih rendah kualitasnya dikarenakan kurangnya dukungan pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan yang dapat mendorong keharmonisan antar desa yang sudah maju dengan desa yang masih tertinggal di Kabupaten Bengkalis.
4. Izzah, L, et al. 2020. Model Pengembangan Desa Ekowisata Kawasan Perkebunan Kopi Desa Sukorejo Kabupaten Bondowoso. 1(1). 390-399. Di dalam penelitian ini terdapat persamaan pada fokus pembangunan yaitu pada pariwisata dan hasil produk kopi desanya. Faktor pendorong lain yang dapat dijadikan tempat utama sebagai daya tarik guna menarik wisatawan datang ke desa ekowisata ini yaitu dengan adanya tempat istirahat yang bernama “Kampung Kopi Kluncing”. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih membahas pada pembuktian kesiapan desa (terutama masyarakat setempat) untuk dijadikan desa ekowisata. Lokus penelitian ini berada di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur sedangkan penelitian yang penulis buat terlaksana di Provinsi Jawa Tengah.

5. Harahap, M. E. U. (2020). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan*, 2(1), 189-204. Penelitian ini memiliki persamaan pada teori yang digunakan yaitu manajemen pemberdayaan masyarakat. Perbedaan penelitian dilihat dari metode yang digunakan yaitu kajian Pustaka. Hasil pembahasan pada penelitian ini yaitu kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan proses manajemen yang sesuai dan baik, dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pengawasan agar kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan dapat menciptakan sekumpulan masyarakat yang berdaya
6. Heyi, Bahiru D. 2020. *The Role of Participation in Development in Enhancing Local People Empowerment: The case of Bishoftu City Administration (BCA), Oromia*. 172-178. Persamaan pada penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh atau dampak dari partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desanya. Persamaan lain yaitu sama-sama menggunakan teori administrasi publik dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan penelitian adalah focus penelitian ini pada peranan pemerintah serta politik dalam pembangunan daerah sedangkan penulis berfokus pada pengelolaan pembangunan desa dengan sasaran yang tepat dengan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Lokus penelitian adalah daerah Kota Oromia, Ethiopia.
7. Ibrahim, M.S.N., Halim, S.A., Ishak. M.Y., Hassan. S. 2020. *The local community awareness on Langkawi UNESCO Global Geopark Status: Case of Kampung Padang Puteh, Langkawi, Malaysia*. 2-7. Penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasan peran dari beberapa stakeholders terkait untuk pembangunan masyarakat melalui sektor pariwisata. Fokusnya adalah pada tingkat pemahaman masyarakat setempat akan sumber daya yang dimiliki untuk dijadikan modal pembangunan ekonomi sehingga tercapai

kesejahteraan pada masyarakatnya. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) dan lokus penelitian adalah di negara Malaysia.

8. Susiyanti, Ambar. 2018. Analisis Daya Saing Kompetitif Agrowisata Kopi Dusun Sirap, Desa Kelurahan, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang Menggunakan Pendekatan *Diamond Mode*. 22-32. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada lokus penelitian yaitu di Dusun Sirap, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan yang sama disebabkan karena memiliki fokus kepada objek pariwisata di Dusun Wisata Sirap tersebut. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada teori yang digunakan, apabila penelitian ini menggunakan teori analisis daya saing dengan pendekatan diamond mode maka penulis menggunakan teori pemberdayaan masyarakat.
9. Silmi, Alin. F. 2017. *Participatory Learning And Action (PLA)* di Desa Terpencil : Peran LSM Provinsi Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo Sumatra Selatan. 1(1). 86-100. Penelitian ini memiliki kesamaan pada teori yang digunakan yaitu mengembangkan pemberdayaan masyarakat di desa yang memiliki potensi dari sumber daya alam yang melimpah namun kurang maksimal dalam pengelolaannya. Perbedaannya adalah pada lokus yang diteliti yaitu penelitian dari penulis berada di wilayah Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang dan penelitian ini berada di Luuk Bintialo Provinsi Sumatra Selatan. Perbedaan lain yaitu pada fokus yang diteliti, penulis lebih fokus kepada pengoptimalan pengembangan wisata dan penjualan kopi sedangkan penelitian ini lebih ditekankan pada penggunaan pendekatan partisipasi PLA.

1.5.2. Administrasi Publik

A. Definisi Administrasi Publik

Administrasi sering diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan dunia tata usaha dan hanya berkecimpung dengan kegiatan mengatur file saja, padahal kata administrasi memiliki pengertian yang cukup luas untuk dipahami.

A.Dunsire (dalam Keban, 2014 : 2) memperlihatkan berbagai variasi batasan istilah administrasi, yaitu diartikan sebagai suatu arahan, pemerintahan, kegiatan pengimplementasian, kegiatan pengarahan, menciptakan prinsip-prinsip dalam implementasi kebijakan publik, kegiatan yang berhubungan dengan analisis, penyeimbangan dan presentasi akan keputusan yang diambil, mempertimbangkan berbagai kebijakan, sebagai pekerjaan kelompok maupun individual yang menghasilkan barang dan jasa publik, serta sektor yang bekerja di bidang akademik dan teoritik.

Tugas-tugas administrasi mencakup kegiatan yang menjelaskan kebutuhan, mengidentifikasi serta interpretasi dan memanfaatkan tujuan organisasi sebagai suatu tutanan program dan pelayanan, mengamankan sumberdaya, pengembangan program dan pelayanan dalam organisasi, evaluasi program dan kepegawaian secara berkala, serta kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan perencanaan dalam melakukan penelitian dan menggunakan kepemimpinan dalam upaya perubahan pada organisasi pelayanan masyarakat.

Publik mengacu pada masyarakat pada suatu kelompok. Menurut Jefkins (dalam A, 2020 : 3) arti dari kata publik adalah sebagai satu kelompok orang-orang yang berkomunikasi dalam wadah organisasi, yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengertian tersebut apabila digabungkan menjadi Administrasi Publik maka terdapat banyak varian dari berbagai perspektif mengenai definisi dari administrasi publik.

Menurut Caiden (dalam A, 2020 : 3) Administrasi Publik adalah fungsi dari proses pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kegiatan

kerjasama dengan organisasi-organisasi yang berjalan di bidang kemasyarakatan dan DPR bertujuan untuk mencuri hati masyarakat dan pengumpulan dana guna kegiatan program dari pemerintah, serta pemantapan dan perubahan organisasi, mencakup pula proses pengawasan dan pengaturan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain sebagainya yang dijalankan oleh lembaga pemerintah seperti lembaga eksekutif dan lain-lain.

McCurdy (dalam Keban, 2014 : 3) mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu proses politik, yaitu dijadikan metode atau cara memerintah suatu negara dan pedoman untuk melaksanakan fungsi negara tersebut.

Nigro & Nigro (dalam Keban, 2014 : 5-6) berpendapat bahwa administrasi publik adalah suatu usaha kerjasama dilingkup kelompok dalam suatu lingkungan masyarakat yang mencakup tiga cabang yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta memiliki peranan yang penting dalam memformulasikan suatu kebijakan mengenai publik sehingga akan menjadi bagian dari proses politik yang berbeda dari administrasi swasta, di dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat akan berbeda dengan beberapa kelompok swasta dan individu. Definisi ini lebih memfokuskan kepada proses institusional yang pelaksanaannya berbeda antara kegiatan publik dan kegiatan swasta.

Dimock dan Koenig (dalam Mindarti, 2016 : 4) mengemukakan pendapatnya, yaitu administrasi publik adalah suatu kegiatan eksekutif dalam proses penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Administrasi publik memiliki peranan vital karena keberadaannya sangat menentukan dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat agar tercipta kondisi kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan di suatu negara.

Pengertian-pengertian administrasi publik tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa administrasi publik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa individu yang berada dalam satu wadah / organisasi dan juga lembaga-lembaga terkait yang dilakukan secara

bersama-sama menyatukan pandangan, pendapat, dan keinginan untuk satu tujuan yang hendak dicapai. Administrasi publik melaksanakan kegiatan pemerintahan tujuan utamanya untuk memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat atau publik sehingga tujuan dari pemerintah dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan pada awal pembentukan dari organisasi atau lembaga-lembaga sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi sesama.

B. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma dalam administrasi menurut Robert T. Golembiewski (dalam Thoha, 2008 : 18) akan dapat dipahami dalam korelasinya dengan kata *Focus* dan *Locus*, sehingga definisi dari administrasi negara apabila didasarkan pada penjelasan dari Golembiewski akan dengan mudah dipahami bahwa seorang penulis akan dapat masuk ke jenis paradigma mana yang paling tepat.

Paradigma mudah bergeser diakibatkan faktor-faktor yaitu seperti perubahan cara pandang dari masyarakat, perkembangan ilmu, tantangan dari luar, *anomalies*, dan lain-lain sehingga masyarakat akan mencari paradigma yang lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapi sehingga mulailah suatu paradigma baru tersebut yang diakibatkan paradigma lama sudah tidak diminati masyarakat akibat lunturnya rasa kepercayaan yang dimiliki. Di dalam ilmu administrasi publik yang dikemukakan oleh Henry terdapat lima pergeseran paradigma dari awal munculnya ilmu administrasi publik sampai dengan sekarang, yaitu :

Paradigma satu (1900-1926), tokoh-tokoh yang berada dibelakang paradigma ini adalah Leonard D. White dan Frank J. Goodnow. Paradigma ini dikenal dengan sebutan paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Implementasi dalam paradigma ini yaitu administrasi harus dilihat sebagai suatu nilai yang bebas dan mengarah pada pencapaian nilai efisiensi dan ekonomi dalam birokrasi pemerintahan. Sisi negative dalam implikasi paradigma ini yaitu pembahasan hanya ditekankan pada lokus nya saja (birokrasi pemerintahan), sedangkan fokus

atau cara metode apa yang tepat untuk dikembangkan pada administrasi publik tidak dibahas secara lebih mendalam dan terperinci sehingga paradigma ini tidak berisi lengkap.

Paradigma dua (1927-1937) yang dikenal dengan paradigma prinsip-prinsip administrasi. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam perkembangan paradigma ini yaitu Willoughby, Gullick & Urwick. Para ahli tersebut yang mengenalkan prinsip dari administrasi sebagai fokus dari administrasi publik. Fokus dari administrasi publik dituangkan dalam POSDCORB atau *planning, organization, staffing, directing, coordinating, reporting dan budgeting* yang memiliki sifat universal sehingga lokus dalam paradigma ini tidak terlalu diperhatikan dengan jelas.

Paradigma tiga (1950-1970) yaitu disebut dengan paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik. John Gaus menyatakan bahwa terori dalam ilmu administrasi publik sama juga dengan teori politik sehingga muncullah paradigma baru yang beranggapan administrasi publik sebagai suatu ilmu politik yang lokusnya terletak pada birokrasi pemerintah sedangkan fokusnya menjadi tidak jelas akibat dari banyaknya kelemahan yang ada pada prinsip-prinsip administrasi publik. Permasalahan tersebut menyebabkan krisis identitas bagi administrasi publik karena ilmu politik memegang peran dominan dalam berjalannya ilmu administras publik.

Paradigma empat (1956-1970) yang dikenal dengan judul administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Fokus dari paradigma ini yaitu meliputi prinsip-prinsip seperti perilaku organisasi, metode kuantitatif, analisis manajemen, analisis system, dan lain-lain lebih dikembangkan secara mendalam. Seluruh fokus yang dikembangkan ditujukan agar supaya dapat diterapkan baik didunia bisnis maupun dunia administrasi publik sehingga mneyebabkan keberadaan lokus menjadi samar.

Paradigma lima (1970-sekarang) paradigma yang digunakan sekarang ini yang disebut dengan administrasi publik sebagai administrasi publik. Paradigma ini fokus dan lokus yang

dimiliki sudah jelas yang dibuktikan dengan penjabaran yaitu : fokus nya meliputi teori manajemen, kebijakan publik, dan teori organisasi, sedangkan lokusnya meliputi permasalahan dan kepentingan yang berhubungan dengan publik.

Dendhardt dan Dendhardt (dalam Wijaya & Damar, 2014 : 7-12) membagi paradigma administrasi publik menjadi tiga model yang memiliki perbedaan pada setiap kelompoknya. Tiga model tersebut yaitu meliputi model administrasi tradisional atau *old public administration*, kemudian yang model manajemen publik baru atau *new public management*, dan yang ketiga ada model paradigma pelayanan public baru atau dalam Bahasa inggrisnya adalah *new public service*.

Di dalam penelitian ini terdapat hubungan antara paradigma manajemen public baru (NPM) dengan topik yang penulis teliti tentang pemberdayaan masyarakat. Di dalam paradigma NPM berfokus pada teori dasarnya yaitu teori ekonomi, sedangkan pemberdayaan masyarakat memang tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, sehingga terdapat hubungan yang saling terkait satu sama lain utamanya untuk kesejahteraan masyarakat bidang ekonomi.

Presiden Reagan (dalam Keban, 2014 : 35-36) menjelaskan NPM dengan istilah *Government is not the solution to our problems, Government is the problem* yang memuat sepuluh sifat pemerintah. Salah satu sifatnya adalah pemerintah harus dapat memberdayakan masyarakat. Peran pemerintah menjadi pemegang utama kunci untuk mendukung kesuksesan dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam suatu daerah.

Pendapat tersebut didorong dengan fakta bahwa masyarakat merupakan sekelompok individu yang berada di posisi terbawah serta tidak mempunyai kewenangan dan *power* dalam pengambilan keputusan pemerintah termasuk dalam menyangkut kegiatan pada kehidupannya. Pemerintah khususnya pemerintah daerah menjadi pihak yang mengetahui kebutuhan apa yang dapat membantu kelancaran proses pemberdayaan sesuai dengan potensi sumber daya alam

dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut serta menjadi pihak yang memiliki kekuatan dalam mengambil suatu keputusan bagi kepentingan masyarakat.

NPM memang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat. Frederick. A. Cleveland (dalam Keban, 2014 : 15-16) memaparkan betapa vitalnya hubungan antara pengaruh dari administrasi publik dengan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan fenomena bahwa administrasi publik dapat memberikan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan cara peningkatan profesionalisme. Peningkatan profesionalisme dapat dilakukan dengan cara menerapkan teknik efisiensi dan efektivitas serta pelatihan guna memberikan ilmu bagi masyarakat agar dapat menerapkan dan melaksanakan tanggung jawab dari administrasi publik sehingga akan tercipta organisasi demokrasi di negara tersebut.

C. Ruang Lingkup dan Ciri Administrasi Publik

Ruang lingkup dari administrasi publik dapat lebih dipahami dengan mengacu pendapat dari Nicholas Henry (dalam Keban, 2014 : 8-9), yaitu:

1. Organisasi publik, pada dasarnya ruang lingkup ini berhubungan dengan model-model organisasi, dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik, berkenaan dengan ilmu dan system manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik serta manajemen sumberdaya Manusia yang dimiliki.
3. Implementasi, berhubungan dengan pendekatan pada kebijakan publik serta cara pengimplementasiannya, privatisasi, etika birokrasi, dan administrasi antar pemerintah.

Di dalam ilmu manajemen terdapat dua kategori yaitu Organisasi Manajemen Publik (OMP) dan juga Organisasi Manajemen Swasta (OMS), untuk membedakan dua jenis manajemen tersebut maka terdapat karakteristik pada masing-masing jenis manajemen. Administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari pemerintahan maka peneliti akan

lebih memfokuskan pembahasan pada pendekatan OMP sebagai bekal untuk mendukung teori pada penelitian ini. Pendekatan OMP memiliki studi yang berbeda dengan OMS, John J. Dilulio, Jr (dalam Suacana, 2018 : 6) memaparkan dua pendekatan dalam OMP yaitu pendekatan Normatif dan Pendekatan Deskriptif.

Pendekatan Normatif menjelaskan bahwa organisasi dan manajemen bermanfaat untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan melalui kegiatan “*public service*” yang didalamnya memuat fungsi-fungsi manajemen seperti *planning, organizing, staffing, coordinating, motivating, controlling* yang mengukur kesuksesan tujuan dengan melihat efektivitas kegiatan-kegiatan organisasi yang telah diorganisir, direncanakan, dikoordinasikan serta dikelola dengan baik. Pada pendekatan Deskriptif lebih menekankan pada manajer yang memiliki dominan pada aktivitas personal, komunikatif, administrative, serta teknis, Mintzberg (dalam Suacana, 2018 : 8).

Pakar atau ahli selain mintzberg, yaitu penemuan Garson dan Overman (dalam Keban, 1995) juga memberikan pandangan baru mengenai pendekatan deskriptif PAFHRIER berdasarkan oleh manajer publik di Amerika Serikat. Pendekatan Deskriptif PAFHRIER terdiri dari *Policy Analysis, Financial Management, Human Resource Management, Information Management, dan External Relations*. Pada penelitian ini, penulis berorientasi pada pembahasan Perencanaan dalam manajemen yang termuat dalam *Policy Analysis*.

1.5.3. Manajemen Publik

Manajemen dalam aspek kehidupan manusia memiliki peranan yang vital karena berfungsi sebagai pengatur dan pengelola untuk dijadikan modal dalam kaitannya pencapaian tujuan seperti yang diinginkan sebelumnya.

Sistem manajemen yang tepat dan kuat sebagai dasar yang harus dimiliki karena berhubungan dengan tujuan yang diinginkan karena berdampak pada terlaksananya

pengelolaan yang dijalankan. Manajemen dijalankan untuk menemukan metode yang tepat dalam melaksanakan suatu kegiatan yang telah diputuskan dengan melalui prinsip-prinsip implementasi yang sesuai. Sebaik-baiknya kebijakan yang akan dibuat apabila tidak didukung dengan teknik implementasi dan metode yang tepat maka kebijakan yang direncanakan tersebut juga tidak akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen hadir sebagai solusi bagi permasalahan tersebut, seperti yang dikatakan oleh Mary Parker bahwa manajemen adalah suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain. Pengertian tersebut selaras dengan pendapat dari Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2014 : 92) mendefinisikan manajemen sebagai sesuatu hal yang bersangkutan dengan orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan organisasi dengan proses-proses yaitu pemanfaatan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung untuk pencapaian tujuan dari organisasi.

Menurut (Sudarmanto, et al, 2020 : 1-2) Manajemen adalah cabang dari ilmu sosial yang mempergunakan kerangka ilmu pengetahuan secara sistematis serta mempunyai aturan, prinsip, serta konsep yang dapat diterapkan pada semua tipe organisasi di skala kecil dan besar dan organisasi bisnis maupun public.

Di dalam pengertian umum, manajemen didefinisikan sebagai seni dan ilmu yang dilakukan dengan cara ilmiah, logis, dan sistematis dalam rangka pencapaian tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien agar mampu berguna bagi pihak-pihak yang memangku kepentingan terkait (Nugroho, Dian, 2017 : 2). Administrasi publik berkaitan dengan manajemen karena menjadi salah satu bagian dari 3 ruang lingkup utama administrasi publik yang dinamakan dengan manajemen publik, kebijakan publik dan implementasi.

Overman (dalam Keban, 2014 : 100) mencontohkan manajemen publik untuk dapat lebih dipahami adalah sebagai suatu sistem jantung dan bersirkulasi di dalam tubuh manusia yang kehadirannya menjadi faktor utama kehidupan. Penjelasan ilmiahnya manajemen publik

adalah suatu proses untuk menggerakkan sumberdaya non manusia dan manusia yang berdasarkan perintah dan pedoman dari kebijakan dari publik. Pendapat lain dipaparkan oleh Hughes (dalam Sudarmanto, et al, 2020 : 2) bahwa manajemen publik adalah tidak termasuk ke dalam administrasi, namun melibatkan organisasi dalam pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan efisiensi dan tanggung jawab yang penuh untuk mencapai hasil maksimal.

Manajemen publik menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, karena disebut juga dengan manajemen instansi pemerintah sehingga Rainey & Han Chun (dalam Wijaya & Damar, 2014 : 15-17) menjelaskan perbedaan dari manajemen publik dan manajemen privat. Perbedaan pertama adalah manajemen publik tidak berorientasi pada ekonomi jadi dalam melaksanakan kegoatannya laba bukan menjadi tujuan utama serta besarnya pengaruh dari mekanisme kondisi pemerintahan dan politik negara.

Perbedaan kedua, yaitu pada transaksi organisasi yang pada manajemen publik memang sangat ditekankan kepada pemberian pelayanan yang jujur, akuntabilitas, *responsive* dan maksimal kepada publik. Perbedaan ketiga adalah manajemen public belum dapat memaksimalkan perannya dalam melayani masyarakat karena banyak ditemukan kelemahan seperti pelayanan yang lambat dan proses yang berbelit-belit.

Manajemen diperlukan dalam organisasi public karena dapat mendorong pencapaian tujuan menjadi lebih efektif dan efisien, mengharmoniskan tujuan-tujuan yang diharapkan sebelumnya, mengembangkan daya saing agar dapat menghadapi tuntutan dan persaingan, menjaga kedamaian dan keharmonisan anggota dalam organisasi supaya terhindar dari adanya konflik yang dapat merugikan organisasi (Nugroho, Dian, 2017 : 10).

Ilmuwan manajemen dunia yaitu Henry Fayol (dalam Hariani, 2013 : 16-18) menyatakan bahwa terdapat lima fungsi manajemen yang apabila dirumuskan yaitu sebagai berikut :

- a. *Planning* (Perencanaan), fungsi ini berfungsi untuk menetapkan dan merencanakan bagaimana suatu kegiatan akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal dari organisasi, sehingga fungsi ini memang diperlukan di awal terbentuknya organisasi untuk membuat rencana, tahapan-tahapan, dan strategi yang sesuai. Fungsi ini dijadikan sebagai pondasi awal yang sangat berpengaruh kepada kesuksesan terlaksananya manajemen dalam suatu organisasi.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian), Dalam fungsi ini, terdapat proses penentuan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dari sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, bertujuan untuk membantu kelancaran dalam pencapaian program dalam manajemen organisasi tersebut karena penempatan keahlian yang sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan.
- c. *Commanding* (Pengarahan), Fungsi dari pengarahan adalah agar anggota dapat menjalankan apa yang seharusnya mereka lakukan sehingga dibutuhkan pedoman arahan dari pihak yang memiliki kewenangan tersebut. Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan semestinya maka pencapaian tujuan akan dapat mudah dicapai.
- d. *Coordinating* (Koordinasi), Pada suatu organisasi yang terdapat beberapa individu dari latar belakang yang berbeda-beda tentu akan sulit dalam menyamakan kesamaan serta pendapatnya sehingga fungsi koordinasi ini hadir sebagai penyatu kesamaan antar anggota agar dapat bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan pekerjaan pada organisasi.
- e. *Controlling* (Pengawasan), Fungsi-fungsi diatas akan sia-sia dan tidak membuahkan hasil apabila tidak ada pengawasan atau pengendalian yang kuat. Pengendalian dibutuhkan untuk mengetahui seberapa program berjalan sesuai dengan harapan serta apakah sudah mendekati pencapaian tujuan atau butuh perbaikan dan evaluasi lebih lanjut.

Fungsi-fungsi manajemen saling berhubungan satu sama lain membentuk kesatuan yang menjadi kekuatan dimulai dari proses *planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling* yang fungsinya saling terkait tidak dapat dipisahkan demi terciptanya tujuan

dari organisasi melalui kegiatan manajemen. Fungsi *planning* atau perencanaan dalam manajemen menjadi fokus utama yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada pembahasan OMP terdahulu maka fungsi perencanaan dapat kita lihat melalui pendekatan deskriptif dari PAFHIER yang ditemukan di negara Amerika Serikat. Salah satu yang termuat dalam PAFHIER adalah *Policy Analysis*, definisi dari *Policy Analysis* adalah suatu pengembangan yang lebih kompleks dari fungsi manajemen *planning* dan *reporting*.

Manajer publik memiliki tugas utama untuk melakukan analisis terhadap kebijakan publik karena jabatan yang ia emban memiliki level tertinggi sehingga tanggung jawab serta wewenang tersebut merupakan salah satu tugas utamanya. Kegiatan analisis tersebut dilakukan dalam tiga kegiatan pokok yaitu perumusan masalah, identifikasi alternatif, dan proses seleksi alternatif.

Analisis dilakukan untuk menanggulangi adanya pihak-pihak yang merugi atau tidak diuntungkan dengan hadirnya kebijakan yang dibuat. Pemerintah harus siap menjadi aktor yang fleksibel demi mewujudkan keadilan sosial. Perencanaan atau *planning* berperan dalam melakukan tiga kegiatan pokok pada proses analisis kebijakan publik. Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan partisipatif, karena sangat dekat dengan upaya untuk mengembangkan masyarakat bertujuan supaya lebih memberdayakan masyarakat dengan dorongan dari kebijakan publik yang telah dibuat.

Perencanaan partisipatif yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah perencanaan yang dilakukan dengan keterlibatan dari semua pihak yang memiliki kepentingan dalam program pembangunan. Pihak terkait melalui proses koordinasi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan ide pendapat dan menciptakan rasa kepemilikan. Menurut Wicaksono dan Sugiarto (dalam Hadiwijoyo, 2018 : 46) Perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan

masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi agar tercapai kondisi yang diinginkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan dari masyarakat itu sendiri dengan bermodal kemandirian pada masing-masing individu. Perencanaan partisipatif sesuai digunakan dalam program pembangunan masyarakat karena subyek atau masyarakat itu sendiri mempunyai pengetahuan lokal tentang daerah setempat yang menjadi kunci penting serta memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan penilaian, menganalisis, dan merencanakan sendiri kebutuhan yang digunakan untuk menjalankan program-program (Mustanir, et al, 2019 : 229).

Manajemen publik dilihat berdasarkan pengertian diatas dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan yang menerapkan metode atau cara-cara tertentu dalam organisasi publik, tujuannya agar tercipta kinerja yang efektifitas dan efisiensi untuk mewujudkan tujuan dari organisasi publik yang dilakukan dengan metode kebersamaan dan membutuhkan peran dari pihak-pihak terkait demi memenuhi kepuasan pencapaian tujuan dari publik atau masyarakat dengan cara menyediakan pelayanan yang prima sesuai penerapan dari fungsi-fungsi manajemen.

Fungsi-fungsi manajemen memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain, akan tetapi fungsi perencanaan menjadi dasar yang paling ditekankan dalam kegiatan manajemen publik karena menjadi patokan dasar bagaimana program manajemen akan dilaksanakan kedepannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kekurangan yang dimiliki oleh organisasi dengan partisipasi dari pihak-pihak terkait sehingga tercipta keselarasan antara program dengan tujuan yang diinginkan.

1.5.4. Pemberdayaan Masyarakat

Program-program pembangunan khususnya yang berorientasi kepada masyarakat memiliki beberapa faktor yang dapat mendukung kelancaran serta kesuksesan pencapaian tujuan dari

pembentukan program pembangunan tersebut. Manajemen hadir sebagai salah satu faktor pendorong untuk merealisasikan kegiatan pembangunan bagi masyarakat, pada ilmu manajemen memuat beberapa fungsi yang diciptakan untuk membantu kelancaran kegiatan terutama dalam sebuah organisasi.

Fungsi perencanaan menjadi fungsi pertama dari beberapa fungsi manajemen yang memiliki sifat mendesak, mendasar, dan memuat inti dari program yang akan dikerjakan. Proses mengelola, mengatur, dan memberikan petunjuk tentang bagaimana proses aktivitas pemberdayaan yang baik dan benar selaras dengan tujuan yang diinginkan agar tidak melenceng dari jalur yang ditetapkan merupakan kelanjutan dari fungsi perencanaan.

Perencanaan dalam suatu program pembangunan masyarakat, contohnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat akan membawa kesuksesan apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab, kinerja dan etos kerja yang baik serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui riset identifikasi yang tepat. Informasi yang mendukung dari berbagai pihak terkait serta keterlibatan masyarakat sebagai subjek dan disesuaikan dengan sosial budaya masyarakat yang sedang diberdayakan juga menjadi poin tambahan untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (Hamid, 2018 : 73).

Ilmu manajemen dalam pemberdayaan masyarakat diyakini menjadi faktor penting, seperti yang dijelaskan oleh (Wijaya & Damar, 2014 : 16-17) bahwa manajemen publik berperan penting untuk mengatur berbagai hal dalam organisasi sektor publik dalam hal ini berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat. Teori tersebut dibuktikan dengan peranan penting fungsi-fungsi manajemen dalam pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek tetapi dalam proses pemberdayaan, masyarakat harus dipandang sebagai subjek yang memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan sehingga rakyat seharusnya diberikan kewenangan dan kekuatan untuk mengatur atau memajemen kehidupan pembangunannya karena sebagai pihak pertama yang

paling mengetahui kebutuhan apa yang paling dibutuhkan untuk mendorong proses pembangunan guna meningkatkan taraf kehidupannya (Soetomo, 2011 : 89).

A. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Era globalisasi membawa dampak yang sangat besar pada dunia, di era ini batas antar negara jauh lebih menipis (*borderless world*). Menipisnya batas antar negara di dunia menyebabkan persaingan menjadi lebih ketat terutama dalam bidang ekonomi. Suatu negara akan tertinggal apabila ekonominya tidak dapat berkembang karena tergerus oleh kemajuan jaman sehingga poin utama dari maju tidak nya suatu negara dapat dilihat dari ketahanan ekonomi nasionalnya.

Ketahanan ekonomi akan terwujud apabila negara dapat mengikuti perkembangan era globalisasi ini, salah satunya adalah dengan melakukan peralihan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Peralihan tersebut meliputi berbagai ciri mendasar yaitu di bidang sosial , budaya, ekonomi, politik dan utamanya adalah pada masyarakat yang menempati negara tersebut.

Berkembangnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan potensi untuk meningkatkan kualitas hidupnya menjadi unsur utama yang dapat menjadi standar pembangunan ekonomi rakyat dengan strategi peralihan ekonomi tradisional menuju ekonomi modern.

Tjokrowinoto (dalam Kasnawi, M, T, 2016 : 2.3) yang menyatakan bahwa pembangunan masyarakat adalah upaya yang dilakukan dalam keadaan sadar untuk beralih ke perubahan untuk beralih ke perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Mengembangkan kemampuan masyarakat tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan usaha yang tepat seperti contohnya pelaksanaan program-program masyarakat melalui pemberdayaan yang berorientasi pada kemasyarakatan.

Perwujudan pemberdayaan masyarakat merupakan gabungan kemitraan dari berbagai pihak yang terkait, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan hanya dengan peran dari satu pihak

saja karena cakupan tugasnya yang luas. Kontribusi dari pemerintah, swasta, masyarakat menjadi dasar utama yang harus terpenuhi dalam melaksanakan tahapan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan kemampuan masing-masing pihak. Penempatan tugas yang sesuai akan mengantarkan pada efisiensi dan efektifitas pencapaian program karena tugas yang diberikan dapat ditangani oleh tangan yang benar sehingga akan meminimalisir adanya kesalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan program.

Pemerintah sebagai salah satu pilar utama dianggap mempunyai *power* yang besar dalam pemberdayaan berorientasi kemasyarakatan. Kapasitas yang dimiliki pemerintah untuk membuat dan mengatur kebijakan menjadi kunci kelancaran dalam pencapaian kegiatan program pembangunan masyarakat dengan menggunakan ilmu dari Administrasi Publik. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memuat perencanaan dasar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan. Kebijakan yang telah selesai dibuat akan membawa dampak bagi manajemen karena memiliki fungsi untuk mengatur dan mengelola kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan yang baik akan menghindarkan ketidaksesuaian kegiatan dan melancarkan pencapaian tujuan. Kedua unsur yang ada dalam Administrasi Publik tersebut membuktikan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berorientasi rakyat yang dalam hal ini adalah kegiatan pemberdayaan maka dibutuhkan penyokong kuat yang berasal dari peranan pemerintah setempat. Dukungan dari pemerintah harus dapat dimanfaatkan dengan bijak serta diserap ilmunya dengan baik sehingga sifat ketergantungan yang mungkin muncul kedepannya akan dapat diminimalisir.

Sifat ketergantungan dengan pemerintah menjadi sisi negative dari pemberdayaan, padahal pemberdayaan itu sendiri dibuat salah satu tujuan yang diinginkan adalah untuk menumbuhkan kemandirian dalam masyarakat sehingga terjadi kondisi bertentangan yang

dapat memunculkan konflik. Konsep dari pemberdayaan adalah dimulai dari pengentasan kemiskinan yang salah satu strategi terbaiknya adalah melakukan perubahan ekonomi dari tradisional menjadi ekonomi modern, tahapan selanjutnya adalah pembangunan ekonomi rakyat, lalu terjadilah suatu pemberdayaan.

Menurut Mulyawan (dalam Sudarmanto, Eko, 2020 : 123-124) Pemberdayaan merupakan cara berpikir bidang pembangunan yang fokusnya adalah pada semua aspek penting dari Manusia (pengembangan sumberdaya) dan lingkungan, yakni aspek material, aspek intelektual, aspek fisik, dan manajerial. Pengertian dari masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki sifat mandiri, hidup secara bersama-sama dalam jangka waktu yang cukup lama, bertempat tinggal di suatu wilayah, memiliki kebudayaan yang sama serta melakukan kegiatan sehari-hari dalam kumpulan tersebut dipaparkan oleh Horton dan Hunt (dalam Kasnawi, M, T, 2016 : 7.6-7.7).

Masyarakat yang menjadi aktor utama program pemberdayaan demi mempertahankan ekonomi nasional dapat merasakan manfaatnya sendiri terutama di bidang ekonomi untuk meningkatkan taraf kehidupannya supaya lebih baik dari kondisi sebelumnya. Masyarakat dituntut agar dapat lebih berdaya sehingga memiliki andil besar untuk mendukung kegiatan program pembangunan nasional melalui program pemberdayaan kerakyatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 mendefinisikan Pemberdayaan Masyarakat sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan dari masyarakat melalui perbaikan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, perilaku, dan kesadaran dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk modal dalam penetapan kebijakan, program, pendampingan, dan kegiatan yang mengutamakan kebutuhan dari masyarakat.

Menurut Luisi dan Hamel (dalam Sudarmanto, Eko, 2020 : 124) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses yang dimana individu atau sekelompok dari orang

secara bersamaan aktif untuk terlibat dalam pengentasan permasalahan yang sedang dihadapi dan dapat membuat keputusan untuk menghadapi berbagai faktor yang berpengaruh pada kehidupannya sehingga tujuan untuk mencapai perubahan dengan cara merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam tahapan *planning*, pengembangan dan pemberian layanan dapat direalisasikan. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa partisipasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang harus ada dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat dari masyarakat yang berada di kondisi tidak mampu untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan ketertinggalan sehingga dapat dikatakan bahwa memberdayakan adalah untuk memampukan dan memandirikan publik atau masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2012 : 39).

Pendapat Mardikanto & Soebianto selaras dengan pemikiran (Soetomo, 2011 : 71) bahwa dalam pemberdayaan masyarakat yang baik maka masyarakat harusnya bukan ditempatkan sebagai objek tetapi harus lebih sebagai subjek karena selain mengingkari harkat martabat manusia juga mengingkari kapasitas manusia yang ditakdirkan sebagai makhluk aktif dan kreatif dalam menjalankan kehidupannya menjadi lebih baik. Sifat manusia sebagai subjek dalam program pembangunan menjadi acuan digunakannya pendekatan perencanaan partisipatif dengan pemberdayaan masyarakat .

Menurut pendapat dari Subejo dan Supriyanto (dalam Mardikanto & Soebiato, 2012 : 43) memaparkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha yang sengaja dilakukan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat local dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya local yang dimiliki dengan melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki kemampuan dan kemandirian dalam bidang ekonomi, ekologi, dan sosial.

Sajogyo (1997 : 4) turut memberikan pendapatnya terkait dengan pemberdayaan yaitu sebagai suatu upaya untuk membuat masyarakat menjadi lebih mandiri dari sebelumnya dengan menentukan sendiri kegiatan-kegiatan serta kebutuhan yang disesuaikan dengan pencapaian tujuan demi meningkatkan kualitas individu.

Pakar lain juga mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu cara yang dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan ke jalan yang benar agar mampu berkuasa atas kehidupannya dijelaskan oleh Rappaport (dalam Suharto, 2005 : 59). Definisi konsep diatas dinilai sesuai dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat karena dapat memaksimalkan sasaran pencapaian pembangunan karena proses yang dijalankan melewati proses serta tahapan yang jelas sesuai dengan persiapan kebutuhan dari masyarakat di suatu tempat yang sedang dilakukan upaya pemberdayaan.

Beberapa kasus pemberdayaan yang gagal karena faktor-faktor internalnya yaitu seperti contohnya terlalu berbelit-belit prosesnya, pihak terkait tidak mendukung berjalannya kegiatan, pengeluaran dana yang besar akibat kebutuhan yang terlalu banyak, kontribusi yang kurang baik antara pihak terkait, dan lain sebagainya.

Pendekatan pembangunan yang berorientasi pada rakyat yang dalam hal ini adalah melalui kegiatan pemberdayaan seharusnya diarahkan kepada lingkungan yang mendukung untuk mendorong pengembangan kemampuan sehingga permasalahan kesenjangan pemerataan pada masyarakat akan dapat dihilangkan. Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang mendukung program juga terdapat peran kemitraan dari pihak-pihak terkait juga sangat penting.

Pemberdayaan dilakukan dengan upaya serta kontribusi dari kedua pihak atau kelompok yang saling terkait satu sama lain. Kedua belah pihak tersebut berkaitan dengan masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk berkembang sehingga harus ada usaha untuk diberdayakan dari pihak yang sudah berdaya. Tahapan yang dilaksanakan harus searah

dalam menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat menjadi ke arah lebih positif dari sebelumnya, baik dari pihak pemerintah, swasta, ataupun pihak lain yang peduli kepada masyarakat kurang berdaya. Berhasil atau tidaknya kegiatan pemberdayaan akan dapat dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap akhir pemberdayaan.

Kesimpulan dari pendapat para ahli diatas tentang pemberdayaan masyarakat atau *community empowerment* dapat dijelaskan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dari masyarakat lokal pada suatu wilayah untuk melakukan pembangunan serta perubahan dengan memanfaatkan individu dalam hal ini adalah masyarakat sebagai subjek perubahan, memaksimalkan potensi sumberdaya pendukung untuk memfasilitasi kegiatan program pemberdayaan dengan bantuan dari pihak yang sudah berdaya kepada masyarakat yang masih belum berdaya sehingga dapat mendorong peralihan.

Kondisi perubahan tersebut bertujuan supaya terwujud kemandirian, kemajuan, dan paling penting tercipta ketahanan di bidang ekonomi melalui kegiatan program pemberdayaan guna peningkatan taraf kehidupan masyarakat melalui proses perubahan yang berada di kondisi belum baik menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya dengan kontribusi dari pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan.

B. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Pakar Sumadyo (dalam Mardikanto & Soebiato, 2012 : 113-117) merumuskan tiga upaya yang dilakukan dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. (Mardikanto, 2005 : 113-117) menambahkan Bina Kelembagaan untuk menyempurnakan tercapainya Tri Bina yang sudah dikemukakan.

Kesimpulan dari adanya upaya-upaya dari bina kelembagaan adalah pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi yang berbeda yaitu :

- a. Pemberdayaan dengan menciptakan iklim atau suasana yang mendukung masyarakat untuk berkembang.

- b. Pemberdayaan harus dapat memperkuat potensi ekonomi dari daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan cara melakukan perbaikan pada kualitas Kesehatan, Pendidikan, dan kelancaran untuk mengakses sumber pendorong kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar).
- c. Pemberdayaan dengan pengembangan ekonomi rakyat, tujuannya untuk mencegah adanya persaingan tidak sehat dan menciptakan keseimbangan kemitraan antara pihak yang sudah maju dengan yang masih berkembang.

C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Rakhman (dalam Sudarmanto, Eko, 2020 : 123), menjabarkan tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk melatih masyarakat agar memiliki kemampuan dalam bidang ilmu dan pengetahuan sebagai modal untuk menuju kemandirian sehingga dapat keluar dari kesengsaraan (kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan yang masih banyak ditemukan pada masyarakat dewasa ini).

Menurut (Soetomo, 2011 : 69) pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk melimpahkan kesempatan, wewenang yang lebih besar dari sebelumnya kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunannya sehingga terciptalah peningkatan taraf kehidupan bagi masyarakat terutama masyarakat local yang berada di daerah yang dilakukan pemberdayaan tersebut. Tujuan selain untuk meningkatkan kondisi ekonomi, pemberdayaan masyarakat juga digunakan untuk mengembangkan kualitas dan akuntabilitas masyarakat tersebut karena menjadi subjek utama dalam proses pembangunan dengan program pelatihan dan lain sebagainya sehingga masyarakat akan lebih berdaya.

Merdikanto (dalam Sudarmanto, Eko, 2020 : 125-126) merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat menjadi enam poin yaitu : memperbaiki kelembagaan (*better institution*), memperbaiki usaha (*better business*), memperbaiki pendapatan (*better income*),

memperbaiki lingkungan (*better environment*), memperbaiki kehidupan (*better living*), memperbaiki masyarakat (*better community*).

D. Manajemen Pemberdayaan Sentra Kopi

Pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai harapan apabila terdapat dukungan penuh dari faktor-faktor pendukungnya yang dalam hal ini terkait dengan partisipasi aktor dan juga pengelolaan serta perencanaan yang matang dari pihak internal maupun eksternal organisasinya. Manajemen hadir sebagai solusi dari pemecahan masalah tersebut. Pemberdayaan masyarakat di Desa Sirap, Kabupaten Semarang memiliki pengetahuan dan kemampuan (*Skill*) dari yang lebih meningkat akibat adanya program pemberdayaan masyarakat setelah dijalin kerjasama dengan pihak eksternal.

Di dalam berjalannya waktu ternyata masih banyak ditemukan kekurangan dalam hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan. Pelaksanaan program pemberdayaan yang masih kurang optimal menyebabkan pendapatan masyarakat Dusun Sirap juga belum dapat sebesar apabila program pemberdayaan dilaksanakan dengan maksimal. Di dalam pelaksanaan penelitian ini penulis memusatkan kegiatan manajemen berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas dari masyarakat dengan swadaya yang prima melalui teori manajemen.

Pemberdayaan masyarakat yang memusatkan pengelolaan pada komponen swadaya memiliki pengertian bahwa titik kelola akan dikuatkan pada keunggulan yang dimiliki oleh faktor internalnya. Pelaksanaan swadaya harus dapat menggabungkan kemampuan masyarakat dengan sumberdaya local supaya dapat lebih dioptimalkan lagi pada tingkat yang maksimal sehingga akan berpengaruh kepada tercapainya pembangunan di daerah tersebut.

Peranan fungsi-fungsi dalam manajemen akan dapat mendorong keberhasilan tujuan tersebut apabila dilaksanakan dengan berpedoman pada jalur yang benar terutama mengacu kepada fungsi koordinasi. Pelaksanaan koordinasi yang baik dari pihak pengelola akan dapat

menyatukan anggota dalam satu tujuan sehingga menjadi kekuatan untuk menjalankan prinsip swadaya masyarakat dan mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Dusun Sirap yang masih terhalang dalam pemerataan sasaran pasar, peningkatan kualitas produk yang dimiliki, serta fasilitas atau akses yang ditempuh untuk sampai di daerah tersebut.

Pemerintah sebagai salah satu pemegang kekuasaan memiliki wewenang untuk membuat kebijakan yang dapat berdampak pada pengelolaan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat perlu diberikan dukungan kebijakan yang sejalan dengan program melalui undang-undang dan kebijakan lainnya, hal tersebut bertujuan supaya dapat menciptakan harmoni dengan adat istiadat serta budaya masyarakat yang menjadi obyek dalam pemberdayaan. Menurut (Amri & Ferizko, 2020 : 232), faktor-faktor administrasi dan organisasi dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat sangat mempengaruhi pencapaian tujuan dan keberhasilan realisasi program.

Koordinasi yang dapat berjalan dengan baik akan dapat mendukung berjalannya fungsi perencanaan dalam manajemen publik supaya dapat bekerja secara optimal, fungsi perencanaan dalam Organisasi Manajemen Publik (OMP) dilihat dengan pendekatan deskriptif PAFHIER maka dapat diselami lebih dalam lagi mengenai manajemen pemberdayaan masyarakat sentra kopi yang ada di Doesoen Sirap Kabupaten Semarang dengan menggunakan teori dari Soekanto (dalam Maryani et al., 2019 : 13-14) yang mengemukakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut :

1) Tahapan Persiapan

Tahapan ini menjadi dasar penting terwujudnya pencapaian efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pemberdayaan. Terdapat dua langkah yang harus disiapkan dalam tahapan ini yaitu penyiapan petugas atau sumber daya Manusia yang sesuai dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kedua adalah penyiapan tempat diadakannya program pemberdayaan. Tahapan Persiapan yang diibaratkan dalam pohon adalah sebagai akar untuk

pelaksanaan program pemberdayaan maka dibutuhkan pupuk berkualitas yang dapat mendukung percepatan pencapaian program supaya dapat bertumbuh kembang dengan baik, pupuk tersebut diartikan sebagai pihak penggerak kegiatan yaitu Sumber Daya Manusia.

Pendekatan PAFHIER dalam manajemen menjelaskan bahwa terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan dalam *Human Resource Management* yaitu pertama bagaimana cara memperoleh SDM berkualitas baik dengan jumlah yang sesuai kebutuhan organisasi, kedua yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki agar mempunyai etos semangat kerja yang tinggi. Ketiga, berhubungan dengan kepemimpinan yaitu bagaimana cara untuk mengendalikan dan memegang SDM yang dimiliki organisasi supaya dapat bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing dan selaras pada tujuan organisasi.

2) Tahapan Pengkajian

Tahapan ini dilaksanakan untuk menyesuaikan kebutuhan apa yang paling sesuai dengan kelancaran proses pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Program pemberdayaan masyarakat ini diharapkan tidak salah sasaran karena sudah memenuhi kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilakukannya program pemberdayaan masyarakat.

Sumber daya yang dimaksud bukan hanya terkait dengan sumber daya manusia saja tetapi juga termasuk sumber daya alam tempat dilaksanakannya program pemberdayaan sehingga lokus dalam pelaksanaan pemberdayaan menjadi salah satu kajian terpenting sebelum dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3) Tahapan Perencanaan Alternatif Kegiatan atau Program

Di dalam tahapan ini para aktor perubahan diharapkan dapat terlibat dalam merumuskan masalah yang sedang dihadapi sehingga masyarakat diajak untuk ikut berfikir bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut dengan alternative program yang dapat

menggambarkan kelebihan serta kekurangannya sehingga dapat ditemukan program yang paling efektif untuk dilaksanakan. Perumusan dan penentuan program kegiatan apa yang paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada tahapan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan manajemen publik yaitu *Policy Analysis*.

Analisis kebijakan publik meliputi tiga kegiatan utama yang dapat mendorong terciptanya program kegiatan yang sesuai dalam pemberdayaan, tiga kegiatan tersebut yakni perumusan masalah, identifikasi alternatif, dan proses seleksi alternatif. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diutarakan kedalam bentuk tertulis atau dalam bentuk proposal terutamanya menyangkut dalam pengajuan dana atau anggaran kegiatan sehingga pemberi dana akan mengetahui tujuan dan sasaran yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.

4) Tahapan implementasi kegiatan pemberdayaan

Implementasi atau realisasi program yang sudah direncanakan dapat dikembangkan dengan baik terlihat dari kerjasama antar anggota yang terlibat supaya program yang direncanakan tidak melenceng dari perencanaan awal. Pada tahapan ini diharapkan seluruh aktor terlibat dapat memahami tujuan dan sasaran dari program pemberdayaan masyarakat sehingga meminimalisir kegagalan pelaksanaan program tersebut. Tahapan realisasi program pada pemberdayaan masyarakat ini berhubungan dengan *Policy Analysis* yang sudah direncanakan pada tahapan sebelumnya, proses analisis kebijakan publik pada tahapan ini dapat dilihat seberapa berpengaruhnya dalam implementasi program pemberdayaan.

Program pemberdayaan kopi yang ada di Doesoen Sirap Kabupaten Semarang juga memuat teori tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat seperti yang sudah dijabarkan oleh Soekanto, Doesoen Sirap sendiri merupakan salah satu daerah di Kabupaten Semarang yang memiliki potensi besar sebagai penyumbang pendapatan daerah yang tertinggi berasal dari

sumber daya alamnya yang melimpah ruah terutama pada bidang perkebunan kopi dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai lokasi pariwisata strategis pada masa yang akan datang.

Program pemberdayaan sentra kopi yang ada di daerah tersebut yaitu membuka *coffeeshop* yang dinamakan “Wande” atau Warung ndeso sebagai wadah bagi masyarakat untuk menjual belikan produk perkebunannya dan sebagai penarik wisatawan untuk datang ke Doesoen Sirap, pelatihan kepada penduduk berusia muda agar dapat menjalankan bisnis kafe dan memasarkan produk kopinya dengan media online, menggabungkan para petani kopi dalam satu organisasi yang dinamakan dengan Kelompok Tani Rahayu IV, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta, dan lain sebagainya.

Kesimpulan dari pelaksanaan manajemen pemberdayaan masyarakat sentra kopi di Doesoen Sirap dalam penelitian ini dengan menggunakan teori tahapan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Soekanto adalah manajemen publik memiliki pondasi utama yaitu fungsi *planning* atau perencanaan yang menjadi fokus utama dalam melaksanakan penelitian ini. Pembahasan OMP menjadi acuan bagi fungsi perencanaan yang dapat kita lihat melalui pendekatan deskriptif yaitu PAFHIER merupakan teori yang ditemukan di negara Amerika Serikat. PAFHIER lebih jelasnya lagi terdiri dari *Policy Analysis, Finansial Management, Human Resource Management, Information Management, dan External Relations*.

Policy Analysis merupakan pengembangan dari fungsi perencanaan dan laporan dalam manajemen publik sehingga selaras dengan penelitian ini. Tahapan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan menggunakan teori manajemen publik dapat menciptakan kelancaran program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam lokus penelitian ini yaitu Doesoen Sirap, Kabupaten Semarang. *Policy analysis* atau analisis kebijakan publik dalam tahapan pemberdayaan masyarakat berguna untuk menjelaskan konsep tahapan pengkajian, perencanaan alternatif, realisasi program, dan evaluasi pada kegiatan pemberdayaan. *Human*

resource management atau sumber daya manusia berfungsi untuk menjabarkan tahapan persiapan program pemberdayaan masyarakat.

Program pelatihan kepada masyarakat berusia muda yang tergabung dalam karang taruna desa dan juga kelompok tani rahayu IV dapat dikaji keberadaannya pada tahapan persiapan dengan menggunakan pendekatan PAFHIER dalam manajemen publik yang didalamnya memuat teori *human resource management* atau SDM sehingga berhubungan dengan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya, pengarahan dari atasan kepada bawahan supaya dapat terkontrol aktivitasnya, dan juga berhubungan dengan koordinasi pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan. Tahapan perencanaan, pengkajian, realisasi program, serta evaluasi dapat dihubungkan dengan teori analisis kebijakan publik atau *policy analysis* yang menjadi jantung utama berjalannya kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

Tahapan tersebut berhubungan dengan program pemberdayaan di Doesoen Sirap maka terletak pada program pembentukan kafe Wande yang dijalankan oleh masyarakat yang berada di organisasi karangtaruna, adanya pesta rakyat yang diadakan setiap tahun, serta terjalinnya Kerjasama dengan pihak-pihak luar seperti pihak pemerintah dan pihak swasta (BCA) yang dalam hal ini terdapat hubungan dengan teori *external relations* dalam pendekatan manajemen publik dilihat menggunakan PAFHIER.

1.6. OPERASIONALISASI KONSEP

Operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui tahapan manajemen guna melaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat sentra kopi di Dusun Sirap yang sesuai dengan teori yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan, pada tahapan ini terdapat 3 (tiga) langkah yang harus disiapkan yaitu :
 - 1) Kondisi pada petugas tenaga pemberdayaan (*community worker*).

- 2) Keadaan lahan atau lapangan tempat dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - 3) Strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan.
2. Tahapan Pengkajian (*assessment*), tahapan ini yaitu :
- 1) Mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat.
 - 2) Menganalisis sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat guna mendorong pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan.
3. Tahapan Perencanaan Alternatif, meliputi kegiatan :
- 1) Warga setempat dilibatkan dalam merumuskan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dihadapi dalam melaksanakan program pemberdayaan.
 - 2) Merencanakan program alternatif.
4. Tahapan Implementasi Program atau Kegiatan
- 1) Mengacu pada keberlangsungan program yang dijalankan pada tahapan ini, melihat bagaimana proses realisasi program dalam pemberdayaan masyarakat.

1.7. METODE PENELITIAN

Penelitian yang baik dibutuhkan suatu metode yang dapat dijadikan jalan pendukung untuk terlaksananya kegiatan penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2009 : 8) metode penelitian adalah cara atau metode ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang digunakan untuk kegunaan dan tujuan tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

Cara-cara ilmiah yang digunakan dalam metode penelitian adalah kegiatan penelitian meliputi ciri-ciri keilmuan yang diantaranya adalah *rasional, empiris, dan sistematis*. Data yang didapatkan dengan metode penelitian dapat dipergunakan untuk memahami dan menemukan solusi yang tepat dari suatu permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian terdapat dua jenis yang berkembang di masyarakat yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menurut Denzin & Lincoln (dalam Albi Anggito, 2018 : 8) adalah bentuk penelitian yang menggunakan dasar alami atau *natural* yang bertujuan untuk menjelaskan kejadian yang sedang terjadi serta dilaksanakan dengan berbagai metode terkait dengan pemecahan masalah yang diteliti. Ahli (Sugiyono, 2009 : 14) dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian menggunakan metode kualitatif ini adalah untuk mendapatkan data yang lebih detail dan mendalam sehingga data yang didapatkan lebih difokuskan pada maknanya.

Kesimpulan dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan terkait pengertian dari metode penelitian kualitatif adalah suatu cara dalam melakukan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme yang dipergunakan untuk meneliti pada keadaan objek yang natural atau alami, dimana posisi dari peneliti adalah sebagai instrument utama. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah secara gabungan, analisis data bersifat induktif serta hasil penelitian dari data yang diperoleh lebih fokus pada makna dibanding pembahasan umumnya.

Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul “Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sentra Kopi di Desa Wisata Doesoen Sirap Kabupaten Semarang” dengan metode kualitatif karena ingin mendapatkan informasi dan data yang lebih mendalam dan mendapatkan hasil yang bermakna guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan menambah ilmu wawasan bagi pembacanya.

1.7.1. Desain Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Di dalam tipe ini, data yang didapat akan menjabarkan informasi yang detail dan jelas dari variable-variabel terkait penelitian karena tipe penelitian ini memuat kegiatan pencatatan, pendeskripsian, analisa yang didapatkan dari wawancara, observasi, rekaman suara narasumber, catatan dokumen dan lain

sebagainya. Desain penelitian ini akan sangat cocok digunakan dalam metode penelitian kualitatif.

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif ini karena sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat di Desa Sirap yang dibuktikan dengan berbagai kekurangan yang masih ada dengan dorongan sumber daya yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

1.7.2. Situs Penelitian

Situs penelitian atau lokasi adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro mendefinisikan situs penelitian adalah sebagai penetapan tempat atau wilayah yang dimana kegiatan penelitian akan dilaksanakan oleh peneliti. Bagian ini penting karena selain sudah menetapkan tujuan dan obyek penelitian, dilakukannya kegiatan penelitian juga harus memiliki lokasi untuk memudahkan pelaksanaan kelancaran penelitian.

Di dalam penulisan proposal ini, lokasi yang digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian adalah di Dusun Sirap, Kecamatan Jambu yang berada di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Lokasi tersebut dipilih karena berkaitan dengan permasalahan dalam kondisi pemberdayaan masyarakatnya yang masih kurang maksimal.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang menjadi bahan untuk mendapatkan informasi berupa data yang digunakan untuk kelancaran proses penelitian. Pihak yang dimintai informasi tersebut biasanya yang memiliki hubungan pada lokasi, kondisi, serta objek yang sedang diteliti sehingga akan memudahkan penulis mendapatkan informasi data.

Peneliti dalam menentukan subjek penelitian ini didasarkan pada teknik *snowball sampling* mengacu permasalahan pengoptimalan pemberdayaan masyarakat di Doesoen Wisata Desa Sirap Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang menentukan subjek penelitian yang

berhubungan dengan judul penelitian adalah Manajer Umum Kafe Wande Dusun Sirap, Ketua Kelompok Tani Rahayu IV, Kepala Dusun Sirap, Masyarakat Dusun Sirap, Pegawai KBPP Kecamatan Jambu, Masyarakat.

1.7.4. Jenis Data

Pada penelitian ini terlaksana dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga jenis data yang dipakai yaitu :

a. Data Tertulis

Data tertulis yaitu berupa uraian teks seperti pendgertian dari ahli, peraturan undang-undang, dan hasil penelitian terdahulu.

b. Data Angka

Data ini terdiri dari data yang berbentuk diagram, tabel angka, jumlah angka, frekuensi, dan lainnya.

c. Data Gambar

Data ini membantu untuk memahami permasalahan yang terkait dengan media visual gambar sehingga akan mempermudah untuk menganalisis dan mengerti maksud dari data tersebut.

d. Data Tabel

Jenis data ini memuat data yang ditampilkan dalam bentuk tabel, yang biasanya terdiri dari beberapa jenis data sehingga akan memudahkan dalam proses membacanya.

Pada penelitian ini, menggunakan gabungan dari keempat jenis data tersebut untuk dapat dipergunakan nantinya sebagai bahan dalam menulis kesimpulan dan hasil penelitian.

1.7.5. Sumber Data

Di dalam memaksimalkan perolehan data yang relevan guna mendukung kelancaran penelitian maka data dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu :

a. Data Primer

Sumber dari data ini diperoleh secara langsung ketika melakukan pengumpulan data di lapangan yang berasal dari subjek (narasumber) yang relevan dengan permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan metode wawancara, survei, dan observasi secara langsung ke Doesoen Wisata Desa Sirap dengan sumber informan terkait dengan permasalahan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara tidak langsung dari lapangan karena jenis data ini didapatkan dari dokumen, artikel, dan berita terdahulu mengenai topik yang berhubungan dengan penelitian. Di dalam penelitian ini digunakan media buku, jurnal, artikel, serta berita-berita terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan masyarakat terutama yang berbasis wisata dan perkebunan kopi.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2009 : 224-225) dalam mengumpulkan data yang berkualitas maka harus berkenaan dengan ketepatan metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Apabila dilihat dari segi metode atau cara Teknik pengumpulan data maka penelitian ini dilakukan dengan :

a. Wawancara / *Interview*

Teknik ini digunakan ketika peneliti ingin memperoleh data yang akurat sebagai salah satu keunggulan pada teknik ini karena sumber informasi memang sudah terbukti berkaitan dengan penelitian, namun tidak dapat diterapkan ketika narasumber yang diteliti dalam jumlah yang besar. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka dan bisa juga melalui media komunikasi (telepon, *videocall*, dan *chat*). Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan manajer yang menjabat di café Wande Desa Sirap, selain itu juga peneliti

pernah mengikuti kegiatan edukasi kopi yang dipimpin langsung oleh Ketua Kelompok Tani Rahayu IV, bapak Ngadiyanto.

b. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) dalam (Sugiyono, 2009 : 226) menjelaskan bahwa teknik observasi menjadi suatu proses yang rumit karena tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis karena berkaitan dengan proses pengamatan dan ingatan. Teknik ini tidak hanya terbatas pada manusia saja tetapi juga obyek-obyek lain seperti alam dan lain sebagainya yang dapat dihubungkan dengan proses penelitian. Peneliti melakukan penelitian langsung ke Dusun Sirap untuk melihat kondisi yang benar-benar terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki peranan besar bagi kelancaran pengumpulan data karena memuat informasi yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama disbanding teknik lainnya karena berbentuk foto, jurnal, karya ilmiah, buku, rekaman suara.

1.7.7. Analisis dan Intepretasi Data

Dey (dalam Albi Anggito, 2018 : 236) mendefinisikan analisis sebagai suatu proses untuk memecahkan data menjadi beberapa komponen yang lebih kecil dari sebelumnya didasarkan pada bahan dan sistem tertentu yang berkaitan satu sama lainnya. Analisis domain digunakan pada penelitian ini yaitu misalnya dalam tipe jenis pelaksana pemberdayaan yaitu masyarakat, pemerintah, pihak luar sehingga tercipta hubungan semantik untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Teori dari Model Miles and Huberman yang pada tahun 1984 mendefinisikan bahwa kegiatan yang dilakukan ketika menganalisis data kualitatif adalah secara interaktif atau menarik serta dilakukan secara berkala dan terus menerus hingga akhir, kegiatan dalam analisis data menurut model ini adalah :

- a. Reduksi Data / *Data Reduction*
- b. Penyajian Data / *Data Display*
- c. Verifikasi / *Conclusion Drawing*

1.7.8. Kualitas Data

Di dalam melaksanakan penelitian maka harus mempunyai standar kredibilitas yang baik yang dapat menunjukkan kualitas dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sehingga dapat mendatangkan kepercayaan dari para pembacanya.

Penelitian ini, penulis menggunakan model triangulasi dalam menguji kredibilitas data yang dikemukakan oleh William Wiersma (dalam Sugiyono, 2009 : 273-274), yaitu suatu pengecekan data yang dilakukan dari berbagai sumber dengan menggunakan beberapa metode dan waktu yang berbeda-beda sehingga memunculkan tiga jenis triangulasi:

a. Triangulasi Sumber

Metode ini dilakukan kegiatan pengecekan data yang sudah diperoleh dengan melalui beberapa sumber terkait, tidak dapat dilakukan pengecekan apabila hanya dari satu sumber saja karena tidak memenuhi syarat.

b. Triangulasi Teknik

Teknik yang digunakan yaitu dengan mengecek data dari sumber yang sama tetapi menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda dari sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumen.

c. Triangulasi Waktu

Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan pengecekan data secara mengulang dan mengumpulkan data di waktu yang berbeda dari sebelumnya serta dilakukan secara berulang-ulang.